



Penerimaan Pajak Daerah Digencarkan

JOGJA--Triwulan pertama tahun ini, realisasi pajak daerah Kota Jogja tercatat baru mencapai Rp 15,5 miliar atau 23,19 persen dari target Rp 66,9 miliar. Angka tersebut memang masih di bawah target, pasalnya dari Pemkot ini setidaknya sudah bisa mencapai minimal 25 persen. Hal inilah yang mendorong pihak Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Jogja terus berupaya meningkatkan angka penerimaan pajak periode berikutnya.

Diantaranya melalui langkah sosialisasi, baik dalam format penyuluhan ataupun pekan pembayaran pajak. Sejak Senin 27 Maret kemarin, gerakan penyuluhan ke kelurahan pun digalakkan. Demikian disampaikan oleh Kabid Pajak Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Daerah Wisnu

>> KE HAL 7

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Jogja

No	Keterangan	Triwulan Pertama		Persentase
		Target	Realisasi	
	Pajak Daerah	66,9 M	15,5 M	23,19 persen
1	Pajak Hotel	30,3 M	6,69 M	22 persen
2	Pajak Restoran	10,5 M	2,78 M	26,5 persen
3	Pajak Hiburan	1,8 M	602 juta	33,47 persen
4	Pajak Reklame	5,49 M	1,1 M	20,72 persen
5	PPJ	18,4 M	4,1 M	22,78 persen
6	Pajak Parkir	419 juta	121,9 juta	29,11 persen
7	Bagi Hasil Pajak	43 M	2,67 M	6,2 persen
8	PBB	28,3 M	759,8 juta	2,68 persen
9	BPHTB	14,7 M	1,9 M	12,97 persen
	Jumlah	109,9 M	18,19 M	16,54 persen

sumber : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Jogja

Penerimaan Pajak Daerah

Sambungan dari hal. 8

Budi Irianto kepada wartawan kemarin.

Diakui oleh Wisnu Budi Irianto, untuk beberapa jenis pajak, realisasinya sudah berada di atas target. Diantaranya untuk pajak restoran sebesar 26,5 persen, pajak hiburan sebesar 33,47 persen, dan pajak parkir sebesar 29,11 persen.

"Realisasi penerimaan pajak tertinggi, itu adalah untuk pajak hiburan yakni 33 persen, atau dari target Rp 1,8 miliar, realisasinya sekitar Rp 425 juta. Ini terutama didorong oleh adanya kantong-kantong hiburan baru, seperti halnya empire XXI. Adanya kantong-kantong baru," paparnya.

4. Asisten

Sambungan Kepada Yth. :

Instansi

1.

2.

"Mestinya di triwulan pertama, realisasi pajak kita minimal 25 persen dari target. Tapi ternyata hingga Maret kemarin baru 23,19 persen. Beberapa sudah berada di atas target, tapi untuk pajak lainnya seperti pajak hotel, reklame, penerangan jalan, PBB, BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-Red) masih belum," ungkap Wisnu Budi Irianto kepada wartawan kemarin.

Menurut Wisnu, penerimaan pajak terendah adalah PBB yang baru terealisasi sekitar 2,68 persen. "Tapi kalau untuk PBB, sebenarnya wajar. Karena wajib pajak baru menerima surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) baru diberikan sekitar Maret lalu. Sementara batas akhir penyerahan SPPT pun masih 30 September mendatang. Jadi masih cukup waktu, namun kita tetap berharap masyarakat bisa menyerahkan SPPT mereka secepatnya," papar Wisnu.

Berkaitan dengan PBB tersebut, Wisnu mengatakan saat ini

sebenarnya masih ada waktu bagi wajib pajak untuk melakukan pembetulan laporan ataupun meminta keringanan pajak. Fasilitas ini, lanjut dia, diberikan dalam rentang waktu tiga bulan setelah diteruskannya SPPT atau dihitung dari mulai Maret hingga Juni mendatang.

"Jadi manfaatkan waktu tiga bulan ini. Apakah untuk melakukan pembetulan ataupun mengajukan keringanan. Pasalnya setelah itu, segala bentuk pengajuan tidak bisa diproses," ungkapnya.

Menurut Wisnu, penyuluhan pajak yang dilakukan oleh kelurahan kali ini akan dilakukan selama 15 hari. Dengan demikian, setiap hari pihaknya paling tidak melakukan penyuluhan di 3 kelurahan berbeda. "Terhitung mulai 27 Maret mendatang. Tapi inipun tidak hanya sekadar penyuluhan, bisa juga untuk mengajukan pembetulan tadi, pembayaran ataupun menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi," kata Wisnu.

Selain melalui penyuluhan, lanjut dia, pihak dinas pun menggelar pekan pembayaran pajak yang diselenggarakan di setiap kelurahan bahkan ke tingkat RW ataupun RT. "Ada, sudah menjadi program kita. Untuk kelurahan setahun akan digelar pekan pembayaran pajak sekitar 52 kali. Masih ditambah dengan pekan pembayaran di kelurahan. Kitapun sangat terbuka terhadap permintaan dari komunitas ataupun kelompok masyarakat, serta RT/RW yang ingin mengundang staf dinas untuk melayani berbagai kebutuhan ataupun keluhan yang disampaikan. Justru yang kita harapkan seperti ini. Masyarakat aktif, dan kitapun juga aktif melakukan jemput bola," paparnya. (tik)

Tindak Lanjut

Untuk ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 April 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005